

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bappeda Kota Tegal dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tegal dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:
 - a. Bappeda memetakan mana kategori miskin mana yang rentan miskin. Jadi yang masuk dalam kategori miskin mereka mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari pusat seperti BKH, program KIP, kartu bantuan pangan non tunai seperti bantuan beras, kemudian ada juga bantuan PBIJKN, pembayaran iuran BPJS ada yang dicover pemerintah pusat, pemerintah provinsi ada juga dicover pemkot.
 - b. Bappeda dalam mengatasi kemiskinan mempunyai dokumen pegangan yaitu dokumen perencanaan, di antaranya RPJMD dan terkait kemiskinan Bappeda mempunyai dokumen SKPD.
 - c. Bappeda bekerja sama dengan dinas-dinas teknis yang ada di Kota Tegal, dimulai dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial, dan semua dinas yang ada di Kota

Tegal, supaya program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran sesuai anggaran teknis.

d. Bappeda Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis agar penanggulangan kemiskinan dapat terealisasi.

2. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Tegal dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tegal yaitu:

a. Penanganan masalah kemiskinan masih bersifat sektoral, koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik.

b. Masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan belum seluruhnya mampu melakukan monitoring dan melakukan evaluasi dari mulai pelaksanaan program sampai paska program.

c. Koordinasi dalam penetapan target dan sasaran penanggulangan kemiskinan belum terpadu pada sumber satu data kemiskinan Kota Tegal.

d. Peran TKPK belum seluruhnya mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulan kemiskinan kepada SKPD maupun kelembagaan lainnya diluar pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

- e. Koordinasi TKPK belum optimal dalam memanfaatkan perusahaan swasta di Kota Tegal untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui program CSR.
- f. Internal maupun eksternal Bappeda belum memahami sasaran yang dituju dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan.
- g. Belum efektifnya menjalin kerja sama antar instansi dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan dokumen perencanaan, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan kepada SKPD maupun kelembagaan lainnya diluar Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Mengoptimalkan dan memanfaatkan perusahaan swasta di Kota Tegal untuk berpartisipasi bersama Bappeda dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tegal.
3. Bappeda diharapkan responsif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan

komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, JURNAL, DAN SKRIPSI

Afandi Anwar, dkk, 1996, *Perencanaan dan pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Prisma, Jakarta.

Agus, I. (2012). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Penyusunan Kebijakan Dibiidang Pembangunan di Kabupaten Tanggamus, *Keadilan Progresif*, Vol. 3 Nomor 1. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Bandar Lampung*.

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jonathan Hendry S.W, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Fakultas Hukum, Universitas UAJY, Yogyakarta

Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafida, Jakarta.

Kartasasmita, G. (2010). *pembangunan untuk rakyat*. Jakarta: cides.

Mardimin, Johanes, 1996, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Mukti Fajar Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni'Matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nurwati Nunung, 2008, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10 Nomor 1 Januari 2008, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2011, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Komputindo, Jakarta.

Setyo, R. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, *Administrasi Negara* vol 5 no 2. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*.

Suyanto Bagong, 2001, *Kemiskinandan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 14 Nomor 4 Oktober 2001, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Yudiatno Bahralipi, 2012, *Peranan Bappeda dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Allaudin, Makasar.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112.

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Kepres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.

Perda Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal. Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11.

Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tegal. Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14.

Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5.

Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan daerah Kota Tegal. Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 17.

RENSTRA 2014-2019 BAPPEDA Kota Tegal

RPJMD 2014-2019 BAPPEDA Kota Tegal

C. SUMBER INTERNET

<http://pemerintah.net/rancangan-organisasi-perangkat-daerah-kabupatenkota>

diakses pada 26 Maret 2018 pukul 21.28 WIB

<http://pemerintah.net/rancangan-organisasi-perangkat-daerah-kabupatenkota/>

diakses pada 26 Maret 2018 pukul 21.50 WIB

<http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda->

[harus-disetujui-pemerintah-pusat/](http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda-) diakses pada 26 Maret 2018 pukul 22.10

WIB

<http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/> diakses pada 26 Maret 2018

pukul 22.20 WIB

<http://biroorganisasi.sultengprov.go.id/2017/09/27/organisasi-perangkat-daerah->

[dilingkungan-pemerintah-daerah-provinsi-sulawesi-tengah/](http://biroorganisasi.sultengprov.go.id/2017/09/27/organisasi-perangkat-daerah-) diakses pada

26 Maret 2018 pukul 22.30 WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html>

diakses pada 26 Maret 2018 pukul 23.30 WIB

<https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 20 WIB

<https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 22 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah diakses

pada 03 Oktober 2017 pukul 23 25 WIB

<https://kbbi.web.id/mengatasi> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 27 WIB

<https://kbbi.web.id/kemiskinan> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 29 WIB

<http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/profil-kota/kondisi-geografis>

diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 40 WIB





PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Kota Tegal

Telp. / Faks. (0283) 351452 Kode Pos - 52123

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN IJIN RISET

Nomor : 071 / 147 / V / 2018

- I. DASAR : Surat Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal
Nomor : 070/160/2018 tanggal 22 Mei 2018
- II. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal tidak keberatan atas pelaksanaan Ijin Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **STEFANUS LOUIS AURA WIBOWO**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 3. Alamat : Perum Rancamanyar E1/2 RT. 001 RW. 007 Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.
 4. Penanggung jawab : **R. Sigit, SH., L.LM..**
 5. Maksud/Tujuan/Riset/ Penelitian/Kerja : **Analisis Peran Bappeda Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Tegal.**
 6. Lokasi : Bappeda Kota Tegal
 7. Peserta : 1 (satu)

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat .
- b. Sebelum pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang kepada Instansi lokasi penelitian .
- c. Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang kepada Responden masyarakat, terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi terkait.
- d. Setelah Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang agar menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kota Tegal.
- e. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang / ini berlaku dari tanggal : 22 Mei 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018.

Dikeluarkan di : TEGAL

Pada Tanggal : 22 Mei 2018

a.n. KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



YANTO P. H., S.Sos., M. Si.
NIP. 19671102 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kota Tegal Sebagai Laporan,
2. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal;
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 03 Tegal
Telp./Fax (0283) 351452 Kode Pos 52123

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / .324

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RITA MARLIANAWATI, S.Sos., M.Si.**
NIP : 19720313 199703 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya
BAPPEDA Kota Tegal

menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **STEFANUS LOUIS AURA WIBOWO**
Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 12 April 1996
No. Induk Mahasiswa : 140511489
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
PTN : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan penelitian SKRIPSI dengan judul "**Analisis Peran Bappeda Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Tegal**" pada bulan Mei 2018 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.

Tegal, 23 Mei 2018

An. Kepala BAPPEDA Kota Tegal
Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan
Sosial Budaya



RITA MARLIANAWATI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19720313 199703 2 003